

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Menurut Lestari (2013) teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal, sehingga steward mempunyai perilaku di mana tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai tujuan dan sasaran organisasinya. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan memiliki kejujuran terhadap pihak lain (Usamah dalam Lestari, 2013).

Teori ini memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya (Puspitarini dalam Lestari, 2013). Teori ini memandang manajemen (pemerintah daerah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaiknya-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders/principals (para pengambil keputusan). Konsep pada teori ini didasarkan pada asas

kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, di mana aparaturnya di pemerintah daerah dicerminkan sebagai good steward yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas yang diperuntukkan dan dipergunakan oleh publik dan para pengambil keputusan ekonomi.

Dalam teori stewardship manajer akan menampilkan perilaku yang sesuai bagi kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, maka steward akan mengalah dan berusaha bekerja sama daripada menentangnya karena steward merasa kepentingan bersama serta berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional dan steward lebih mementingkan usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu, teori stewardship ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik.

Teori ini sangat cocok diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi publik di mana steward diposisikan sebagai pemerintah daerah dan principals sebagai publik serta para pengambil keputusan. Dalam hal ini kualitas laporan keuangan yang akan digunakan oleh publik dan para pengambil keputusan.

2. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pemahaman yang baik dibutuhkan dalam hal apa saja agar segala sesuatu dapat teratasi. Pemahaman sama dengan mengerti dengan benar apa yang dimaksudkan. Dengan memahami segala sesuatu dengan baik maka semua yang diinginkan dapat tercapai, misalnya dalam penyusunan laporan

keuangan, maka pemahaman terhadap sebuah standar harus benar-benar diperhatikan agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007).

Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu tujuan SAKD adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat & akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal & relevan, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak eksternal. Pihak-pihak eksternal yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung disebut sebagai *stakeholders* yakni meliputi:

- a. DPRD
- b. Pemerintah pusat
- c. Pemerintah daerah lain (Provinsi & Kabupaten/Kota)
- d. Badan Pengawas Keuangan
- e. Investor, kreditor dan donatur

f. Masyarakat

Akuntansi pemerintah dibedakan menjadi dua yaitu akuntansi pemerintah pusat yang sering kita sebut akuntansi keuangan pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang juga kita sebut dengan akuntansi keuangan daerah. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah dalam Halim, 2002:19). Sedangkan menurut Halim dalam Andini dan Yusrawati (2014) Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang memerlukan.

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik di mana semua transaksi dicatat lalu dilaporkan kepada publik berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Nordiawan dalam Nurillah (2014) akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Data-data yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah daerah digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan

keuangan pemerintah kepada pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif serta masyarakat.

Akuntansi di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah daerah. Terdapat beberapa sistem pencatatan data akuntansi yang terkait dengan transaksi-transaksi yang terjadi di pemerintah daerah, antara lain dengan sistem pencatatan single entry, double entry, dan triple entry. Dalam struktur pemerintahan di daerah, SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungannya.

Sedangkan kegiatan akuntansi pada SKPD meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Sementara itu laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD antara lain adalah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Oleh sebab itu dibutuhkan pemahaman yang tinggi dari pegawai SKPD untuk bisa membuat dan menyajikan laporan keuangan daerah yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan berguna bagi pihak yang berkepentingan serta para pengambil keputusan ekonomi.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Definisi teknologi informasi menurut Australian National Training Authority (ANTA) dalam Supriyanto (2015:5) adalah sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, menyajikan, mengelola data dan informasi. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Nurillah, 2014). Jadi pada intinya istilah teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya. Selain itu komputer juga dapat bekerja sangat konsisten serta akurat dan reliabel dalam waktu yang lebih singkat bila dibandingkan dengan kemampuan manusia.

Saat ini hampir semua masyarakat membutuhkan komputer dalam setiap bentuk pekerjaannya karena komputer telah menggantikan teknologi manual melakukan pemrosesan atas data yang jumlahnya sangat besar ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks/rumit. Hampir di setiap bidang pekerjaan manusia saat ini misalnya di kantor, perusahaan, sekolah, rumah dan di mana pun menggunakan komputer. Bahkan beberapa pekerjaan sangat tergantung terhadap pemakaian teknologi komputer ini, misalnya

sistem perbankan modern yang menggunakan transaksi online, industri atau pabrik modern untuk mengendalikan setiap proses produksi, kedokteran untuk mendiagnosis penyakit pasien, penerbangan dan ruang angkasa untuk mengendalikan pesawat, mengomunikasikan data, dan lain sebagainya.

Begitu pula di setiap instansi pemerintahan atau perkantoran telah menggunakan komputer untuk sekedar mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat, pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Wilkinson et al, dalam (Assidiqi, 2016) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan kepada publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan oleh organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik termasuk pemerintahan.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP Nomor 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Ariesta, 2013). Pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada publik. Sejalan dengan perkembangan zaman BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah membuat aplikasi yang bernama SIMDA

(Sistem Informasi Manajemen Daerah) untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Inpres Nomor 4 tahun 2011.

Salah satu tujuan dari dibuatnya aplikasi SIMDA ini adalah untuk menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang di mana informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Aplikasi tersebut dapat diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah dan sudah terintegrasi. Maka dari itu aplikasi ini sangat bermanfaat digunakan oleh aparatur daerah ataupun pegawai SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi ini efisien, cepat, dan akurat dalam melakukan penatausahaan sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas (Gomes, 2003:1). Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Albab, 2015). Manusia adalah salah satu faktor sumber daya yang sangat penting dalam upaya tercapainya tujuan dalam organisasi, sehingga perlu dikelola dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

SDM yang berkompeten harus memiliki karakteristik yang terdiri dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan perilaku (*attitude*). Dari beberapa karakteristik tersebut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi diwajibkan memiliki pengetahuan yang luas dan seberapa baik keterampilan yang dimiliki serta perilaku yang tercermin dari diri SDM tersebut. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan sumber daya yang berkualitas untuk mewujudkan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. SKPD memerlukan SDM yang berlatar pendidikan di bidang akuntansi, sering mengikuti berbagai pelatihan akuntansi dan memiliki pengalaman yang banyak di bidang akuntansi. Oleh karena itu SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan serta diharapkan dapat memahami dan menerapkan logika akuntansi dengan benar supaya laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan jauh dari kekeliruan pada informasi yang disajikan.

5. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Harahap dalam (Karimah, 2015) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan dan juga untuk menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Nurillah (2014) laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah

akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk mengambil keputusan (Sukmaningrum, 2012).

Maka dari itu, segala informasi yang ada di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus berkualitas dan bermanfaat bagi kebutuhan para pemakainya. Selain itu pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dengan seksama untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, segala informasi akuntansi yang ada di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila laporan keuangan dibuat dengan tepat waktu dan informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan para pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa di masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Adapun informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut ini:

- 1) Manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu;

- 2) Manfaat prediktif (*predictive value*), artinya informasi tersebut dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil dari masa lalu dan kejadian pada masa kini;
- 3) Tepat waktu (*timeliness*), artinya informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan;
- 4) Lengkap (*complete*), yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi para pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dapat dicegah dan dihindari.

b. Andal

Informasi di dalam laporan keuangan dapat dikatakan andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan bebas dari kesalahan yang material, bersifat netral, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Adapun karakteristik informasi yang andal antara lain yaitu:

- 1) Penyajian secara wajar/jujur, artinya informasi menggambarkan transaksi dengan jujur serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- 2) Dapat diuji kebenarannya, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh;

3) Netral, artinya informasi tersebut diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu. Serta tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat di dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila suatu entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang disediakan dan dimaksudkan.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi serta keseimbangan antargenerasi (Azzahro, 2015).

Banyaknya syarat dan ketentuan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut maka menyebabkan dituntutnya pelaporan keuangan daerah yang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan informasi yang ada pada laporan keuangan tersebut sangat penting dan menjadi tanggungjawab aparatur pemerintah terhadap masyarakat/publik. Sehingga laporan keuangan dapat digunakan untuk para pengambilan keputusan serta pihak-pihak yang berkepentingan secara maksimal.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Karimah (2015) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Latar Belakang Pendidikan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta dengan responden sebanyak 74 pegawai. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintahan, latar belakang pendidikan, sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Azzahro (2015) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah” pada SKPD Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan model regresi linier. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia tersebut belum memadai dan minimnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Lalu variabel selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah tetapi tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tidak berpengaruhnya pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah dikarenakan kurangnya pemanfaatan teknologi yang ada. Serta variabel pengendalian internal akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Albab (2015) dengan judul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah” di SKPD Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang terkumpul dan dapat diolah adalah sebanyak 80 kuesioner. Faktor-faktor dari penelitian tersebut adalah variabel independen yang terdiri dari kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif signifikan.

4. Assidiqi (2016) melakukan penelitian tentang “Dampak Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” pada SKPD Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” di SKPD Kota Depok. Kuesioner yang diisi oleh responden hanya terkumpul sebanyak 64. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Sukmaningrum (2012) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, sistem

pengendalian internal, dan faktor eksternal. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan untuk kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi kualitas dan kuantitas.

C. Hipotesis

1. Pengaruh pemahaman SAKD terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

Salah satu usaha untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Di dalam SAP terdapat sistem akuntansi pemerintah yang menjadi alur dalam penyusunan laporan keuangan baik di pusat maupun di daerah. Pemahaman terhadap SAKD sangatlah penting bagi setiap aparatur pemerintah daerah karena di dalamnya termuat berbagai prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan demi untuk terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Assidiqi (2008) menyatakan bahwa pemahaman SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian yang

dilakukan oleh Karimah (2015) menyatakan bahwa pemahaman SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Albab (2015) menyatakan bahwa SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Xx Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015) menyatakan bahwa penerapan SAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dari pernyataan beberapa peneliti tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemahaman SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh perorangan tetapi juga pada organisasi, contohnya organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Manfaat yang diberikan oleh teknologi informasi sangatlah besar, salah satunya adalah kecepatan dalam memproses suatu data serta keakuratan data yang diolah juga sangatlah terjamin. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi wajib bagi setiap aparatur pemerintah daerah supaya laporan keuangan yang disusun baik dan benar agar nantinya laporan keuangan tersebut dapat dijadikan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Nurillah, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Assidiqi (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzahro (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan daerah. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Albab (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Agustiawan dan Rasmini (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari pernyataan beberapa peneliti tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

3. Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar serta proses

dalam pengambilan keputusan. Informasi-informasi yang tersaji dalam laporan keuangan harus bermanfaat yang artinya informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan secara maksimal. Maka dari itu sumber daya manusia di pemerintah daerah harus memiliki kompetensi di bidang akuntansi karena kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya (Assidiqi, 2016) supaya tujuan suatu organisasi terwujud dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Assidiqi (2016) menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Albab (2015) menyatakan bahwa kompetensi SDM juga berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2013) juga menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2013) menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010) menyatakan bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dari

pernyataan beberapa peneliti tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

4. Pengaruh kompetensi SDM terhadap hubungan pemahaman SAKD dengan kualitas laporan keuangan SKPD

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban yakni LKPD yang baik dan benar dengan mengacu SAP. Sumber daya yang berkompeten harus memiliki karakteristik yg terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan perilaku agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai. Maka dari itu dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi untuk dapat memahami SAKD secara keseluruhan agar dapat tercipta laporan keuangan daerah yang berkualitas. Dari penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap terhadap kualitas laporan keuangan seperti penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015). Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) menyatakan bahwa penerapan SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kompetensi SDM sebagai variabel moderasi mampu memengaruhi hubungan antara pemahaman SAKD terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dari pernyataan beberapa peneliti tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap hubungan antara pemahaman SAKD dengan kualitas laporan keuangan SKPD

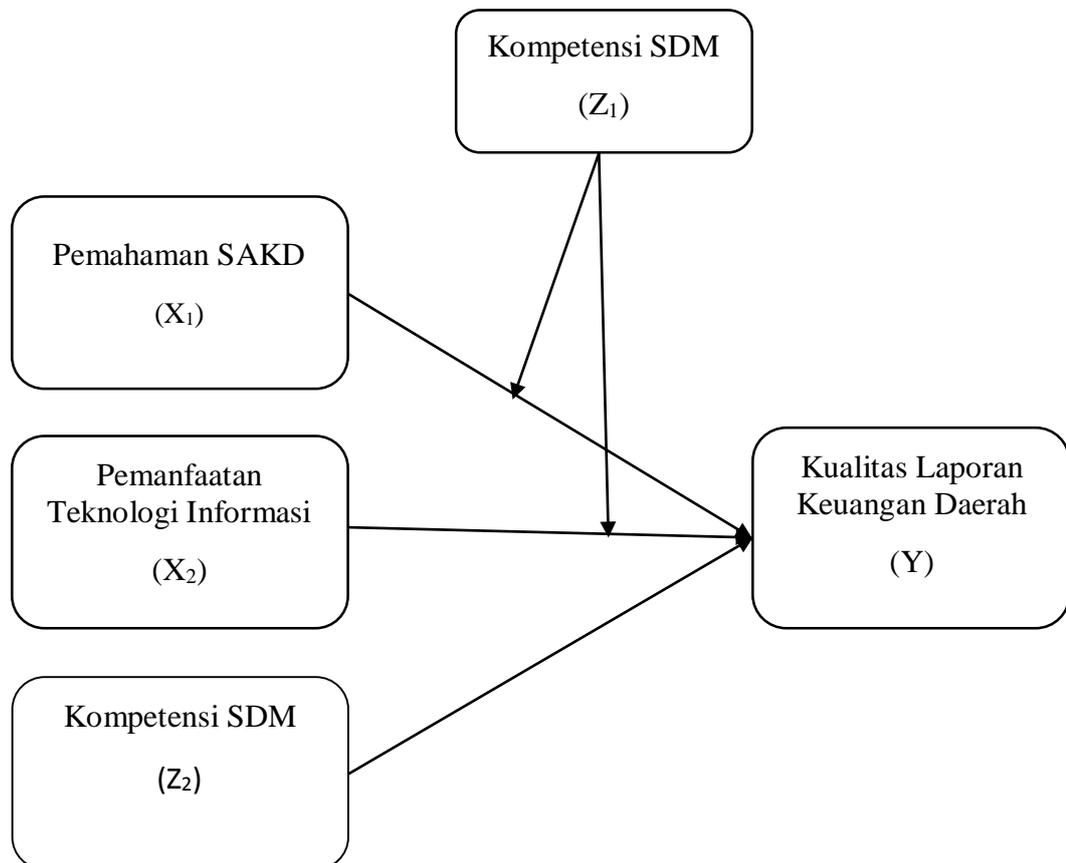
5. Pengaruh kompetensi SDM terhadap hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan SKPD

Pada zaman seperti sekarang ini teknologi informasi berupa komputer sangatlah menunjang berbagai aktivitas dan operasi. SDM yang memiliki kompetensi tinggi haruslah memiliki skill dalam menggunakan teknologi informasi saat ini agar suatu data dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Dengan adanya SDM yang berkompeten mengolah data akuntansi dengan komputer atau teknologi lainnya maka dapat terwujudnya keefektifan dan keefisienan serta keakuratan dan kecepatan dalam menyusun laporan keuangan mencapai kualitas yang tinggi. Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustiawan dan Rasmini (2016) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan. Dari pernyataan peneliti tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan SKPD

D. Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel independen pemahaman SAKD dan pemanfaatan teknologi informasi dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual